



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Bersama dan Perceraian

1. Harta Bersama

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. tujuan perkawinan di antaranya, yaitu agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun, menjaga

kehormatan diri dan melanggengkan agama Allah di atas muka bumi. Selain tujuan tersebut manusia juga tak bisa lepas dari kodratnya, bahwa manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang keberadaannya selalu membutuhkan orang lain. Maka perkawinan juga mempunyai tujuan untuk dapat hidup bermasyarakat dalam satu perikatan keluarga.

Guna mewujudkan semua itu, dan juga untuk memenuhi keperluan hidup antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama, maka dibutuhkan suatu kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri, untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-hari, mulai dari kebutuhan yang sifatnya primer hingga sekunder, seperti kebutuhan makan sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak-anak, berobat hingga pemenuhan perabotan rumah tangga. Bahkan untuk memenuhi kewajiban manusia sebagai hamba Allah, manusia tetap memerlukan harta yang bisa digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan.

Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

Menurut Soebakti Poesponoto (terjemahan dari Ter Haar BZN), dalam bukunya Asas-asas dan Susunan Hukum Adat bahwa harta perkawinan adalah barang-barang yang harus dimiliki oleh suami istri (bersama anak-anaknya) sebagai kesatuan keluarga yang terwujud karena perkawinan dan hidup bersama. Sehingga mengenai kedudukan harta perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan ini masing-masing daerah tidak sama. Barang pusaka tetap menjadi milik suami atau istri yang menerimanya dari warisan atau penghibahan, walau mereka cerai atau tidak bersama lagi. Apabila salah satu meninggal serta tidak mempunyai anak maka harta tersebut kembali kepada keluarga dari suami atau istri yang meninggal. Jadi tidak diwariskan kepada keluarga dari suami atau istri yang masih hidup, maksudnya supaya barang-barang tersebut tidak hilang serta kembali ke asalnya. Jadi barang-barang milik suami dan istri yang diterima sebagai warisan atau penghibahan tetap terpisah satu dengan yang lain sampai pada saatnya barang-barang itu secara warisan beralih kepada anak-anak mereka, bila ada Keturunan inilah yang melanjutkan hak atas kekayaan dari suatu keluarga. Kepemilikan harta setelah pernikahan menurut Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 ayat (1) disebut dengan harta bersama atau harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta yang diatur dalam ayat (2) Pasal 35 yakni harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikenal juga adanya harta bersama, antara lain diatur dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam

disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Gono Gini, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam menyingkapi harta Gono Gini masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya. Demikian pula sebaliknya kedua belas pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya. Menurut Pasal 36 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa terhadap harta Gono Gini, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum baik berupa penjualan, penghibahan atas harta Gono Gini, kecuali atas sepersetujuan kedua belah pihak yakni antara suami dan istri.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Gono Gini. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perceraian, maka secara hukum pihak suami/istri berhak masing-masing seperdua dari harta Gono Gini. Namun apabila terjadi perselisihan mengenai harta Gono Gini ini, masing-masing pihak dapat merujuk kepada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta Gono Gini, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama Konsep kemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dan diderivasikan dari premis filosofis, nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami istri dalam kehidupan perkawinan. Mengenai harta benda tersebut, maka kedua patner dalam ikatan perkawinan tersebut dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak yang sama di bawah hukum karena memelihara rumah tangga sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pelah pihak. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, oleh karenanya dimiliki secara bersama oleh suami istri. Karena sepadan keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta tersebut. Oleh karenanya, ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan, kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta benda. Rumusan ini mensignifikasikan kontribusi penting yang dibuat oleh hukum adat terhadap munculnya hubungan yang lebih egalitarian antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah

atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah. Pencahariaan bersama suami isteri atau yang disebut harta bersama atau gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Hal ini termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 mengatakan bahwa :

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual. Mengenai Harta Benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan :

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Hal ini berlainan sekali dengan sistem yang dianut B.W yaitu bahwa dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami isteri. Menurut UU No. 1 / 1974 kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah:

a. Harta bersama

Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi asal usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu

pembagian dan pemecahan baik karena perceraian maupun kematian (perceraian). Adalah sangat menguntungkan, kalau di kemudian hari dalam peraturan pelaksanaan diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal 35 ayat 2, tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan pasal 35 ayat 1, maka ketentuan mengenai harta pribadi hibahan dan warisan, kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami / isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.

Pasal 35 ayat 2 mengandung suatu asas yang berlainan dengan asas yang dianut dalam B.W, yang menyebutkan bahwa yang suami dan atau isteri peroleh sepanjang perkawinan dengan Cuma-Cuma baik hibahan atau warisan masuk ke dalam harta persatuan kecuali bila ada perjanjian lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan banyak terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dibahas dalam Bab XIII. Menurut pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Mengenai harta bersama lebih lanjut diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97.

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain-lain.

Menentukan status pemilikan dari harta benda yang ada pada keluarga dalam hubungan perkawinan sangat penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian. Sehingga sudah ditentukan mana yang menjadi hak suami dan mana pula yang menjadi hak istri. Atau mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris bila terjadi kematian di salah satu pihak suami istri. Dalam hal ini dapat ditentukan asal-usul harta tersebut telah diketahui. Sistem hukum perkawinan dalam KUH Perdata dalam pasal 119 ”mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekadar mengenai itu dengan

perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan perkawinan telah mengadakan perjanjian- perjanjian tertentu di antara mereka. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan isteri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami isteri. Sistem yang dianut KUH Perdata tersebut di atas bertolak belakang dengan sistem pengaturan yang dipakai oleh Undang-undang Perkawinan, hukum adat dan hukum Islam. Di mana pada prinsipnya ketidakhukuman yang terakhir ini menentukan bahwa dengan ada contoh lain, misalnya tentang penggunaan uang nafkah. Uang nafkah yang merupakan bagian dari harta gono gini dan sesungguhnya untuk kepentingan keluarga tidak dapat digunakan di luar kebutuhan keluarga kecuali mendapatkan hak dari pihak yang menghasilkan nafkah tersebut. Jika penggunaan harta gono gini tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah KHI pasal 92 ”suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Suami/istri juga diperbolehkan menggunakan harta gono gini sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini KHI pasal 91 ayat mengatur ”harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 93 KHI mengatur ketentuan hukum harta gono gini yang terkait dengan utang. Ayat 1 pasal itu

menyebutkan bahwa "pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing", maksudnya utang yang secara khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya, salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ketentuan ini tidak berlaku jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga. Tentang hal ini ayat 2, pasal 93 menyebutkan "pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami". Dalam hal ini suami merupakan kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, jika harta gono gini tidak mencukupi untuk membayar utang bersama. Hal ini dibebankan kepada harta suami.

Istilah Gono Gini merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat, yang artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air baik dalam undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI) adalah harta bersama. Hanya istilah Gono Gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Konsep dan istilah Gono Gini sebenarnya diambil dari tradisi Jawa, kemudian dikembangkan sebagai ikatan perkawinan. Oleh karena itu,

harta yang memang berhubungan dengan ikatan tersebut kemudian disebut dengan harta Gono Gini.

Dari definisi di atas dapat diartikan harta gono gini, yaitu harta yang dimiliki oleh suami istri yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang bisa digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan hidup, yang mana harta tersebut bisa berasal dari harta warisan, hibah, hadiah, saat pernikahan, hasil pencarian suami istri dan bisa juga berupa harta yang dihasilkan bersama oleh suami dan istri selama pernikahan.

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan isteri. Hal ini tentunya apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah. Adapun harta bersama pada dasarnya terdiri dari:

a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;

- b. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri; dan
- c. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama antara lain:

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah didapat suami / isteri sebelum menikah;
- b. Hadiah;
- c. Harta warisan.

Harta Bersama

Istilah Gono Gini merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat, yang artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air baik dalam undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI) adalah harta bersama. Hanya istilah Gono Gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Konsep dan istilah Gono Gini sebenarnya diambil dari tradisi Jawa, kemudian dikembangkan sebagai ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan tersebut kemudian disebut dengan harta Gono Gini. Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta Gono Gini (di Jawa)

hanya diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing.

Pembentukan hukum keluarga secara umum dipengaruhi dan terdapatnya unsur antara 3 (tiga) sistem hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat. Dasar hukum tentang harta bersama dalam hukum Islam dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

a. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Masalah harta bersama dalam diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, yang secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Akan tetapi apabila perkawinan putus karena perceraian,

Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum

adat. Pasal-pasal tersebut di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:

- 1) masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum nikah, dan;
- 2) dengan ikatan perkawinan, isteri maupun suami secara intrinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Mengenai harta bersama, dalam Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 85 menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 95 yang terdiri dari dua ayat sebagai berikut:

- (1) Suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya;

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun isteri. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, sementara harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, dan sebaliknya isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, dimana harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas

persetujuan pihak lain, akan tetapi bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Sehubungan dengan hutang, pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, tetapi pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami dan bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri .

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan . Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama harus didasari ketiga sumber hukum positif tersebut. Berkaitan dengan harta bersama, hukum positif juga memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama

jika dikhawatirkan salah satu pihak suami istri akan melakukan kecurangan, seperti mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga dengan maksud ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan dalam hal ini di kenal dengan istilah sita marital.

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPdata Pasal 128 yang menyebutkan bahwa “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”. Menurut KHI apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu putusan cerai terlebih dahulu

Seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa secara umum pembagian harta bersama dilakukan ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan, masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama yaitu separoh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut selama perkawinan berlangsung. Ketentuan pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separuh harta

bersama adalah berdasarkan peran baik suami maupun isteri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain-lain.

Menentukan status kepemilikan dari harta benda yang ada pada keluarga dalam hubungan perkawinan sangat penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian. Sehingga sudah ditentukan mana yang menjadi hak suami dan mana pula yang menjadi hak istri. Atau mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris bila terjadi kematian di salah satu pihak suami istri. Dalam hal ini dapat ditentukan asal-usul harta tersebut telah diketahui.

Sistem hukum perkawinan dalam KUH Perdata dalam pasal 119 "mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain". Apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan perkawinan telah mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu di antara mereka.

Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa berbagai macam, tergantung dari barang-barang apa yang akan menjadi milik bersama antara lain berupa

geneenschap van winsten verlies (perjanjian persatuan untung dan rugi) dan geneenschap van vruchten en inkonstan (perjanjian persatuan hasil pendapatan).

Pengertian peran tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami tidak bekerja tetapi masih tetap memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separoh harta bersama. Sebab meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak dan membantu pengurusan rumah tangga, pihak isteri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Sebaliknya, ketika isteri bekerja sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner isteri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama separuh bagi isteri dan separuh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal ini bagian isteri semestinya lebih banyak dari pihak suami. Bahkan ketika ternyata pihak suami selama dalam perkawinan justru boros, berjudi maupun mabuk, maka tidak pantasnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama.

2. Perceraian

Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talak diartikan sebagai perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau isteri. Talak dalam arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan mengadakan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik-talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (fazah).

Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada isterinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

a. Baik isteri atau suami tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; apabila suami dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dengan demikian jelas bahwa walaupun telah terjadi perceraian suami tetap memiliki tanggung jawab terhadap bekas isterinya selama bekas isterinya belum memiliki

